

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media :	Radar Sampit	Halaman :	08
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News	
Palangka Post	Tabengan	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Pengelolaan Aset

Dinilai Kurang Optimal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat menilai Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) dinilai kurang optimal

dalam pengelolaan aset daerah.

Anggota DPRD Kobar Muhammad Syamsuri mengatakan, Pemkab Kobar mempunyai banyak sekali aset yang tersebar dibanyak tempat. Banyaknya aset tersebut, justru ada yang terbengkalai tidak di urus bahkan ada yang belum tercatat aset daerah.

“Sudah sering kami ingatkan soal aset. Dalam

pengelolaan aset daerah agar kedepannya lebih diperhatikan lagi oleh Pemkab Kobar,” kata Muhammad Syamsuri.

Menurutnya, banyak sekali aset milik pemerintah Kabupaten yang pengeloanya kurang optimal. Salah satunya pasar yang ada di desa. Pasar itu menjadi aset daerah tapi tidak digarap secara optimal.

“Jika pemerintah daerah

kurang perhatian dan juga tidak optimal dalam mengelola aset yang ada di Desa, kiranya aset tersebut dihibahkan kepada pemerintah desa,” ujarnya.

Hal ini bakal jauh lebih bagus kedepannya dalam rangka mengoptimalkan aset. Jangan sampai kurang optimalnya dalam mengelola aset ini menjadi celah bagi pihak lain untuk mengklaim dan sebagainya.

“Sekarang ini banyak pihak yang mengklaim lahan yang menjadi aset pemerintah. Tidak usah jauh-jauh bahwa tanah kantor DPRD ini juga ada yang mengklaim. Meski sekarang hal ini masih berproses,” ujarnya.

Diharapkan kedepan tidak terjadi hal yang demikian. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan dan pendataan

aset.

“Termasuk jika asetnya itu masih digunakan untuk kepentingan umum juga harus dirawat dan diperbaiki untuk layanan publik. Namun seperti saran saya tadi, jika Pemda tidak mampu maka aset yang ada di desa agar dihibahkan kepada pemerintah desa dan ini tujuannya sama dalam rangka mengamankan aset,” katanya. c-uli